



2024

# RENCANA KERJA (RENJA)

PEMERINTAH DAERAH  
KOTA CIMAHI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan untuk menjadi arahan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana kerja ini merupakan dokumen turunan dari dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Masa Renja tahun 2024 merupakan tahun kedua pada periode Renstra Tahun 2023-2026 dimana pada periode tersebut Kota Cimahi tidak memiliki kepala daerah terpilih hingga terpilihnya kepala daerah baru melalui pemilukada serentak yang direncanakan akan diselenggarakan pada akhir tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen Rencana Kerja ini dapat memberikan manfaat maksimal khususnya bagi pengembangan berkelanjutan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

**Cimahi, Juli 2023**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH**

  
**Dra. IPAH LATIPAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP. 19650227 199102 2 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022</b> ....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian renstra .....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	21
2.3. Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	42
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	44
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	46
3.3. Program dan Kegiatan .....	47
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> ....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	58

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 .....11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi .. .....25
Tabel.2.3	Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Disdukcapil .....29
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan .....31
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Disdukcapil Kota Cimahi Tahun 2023 .....42
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 .....52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

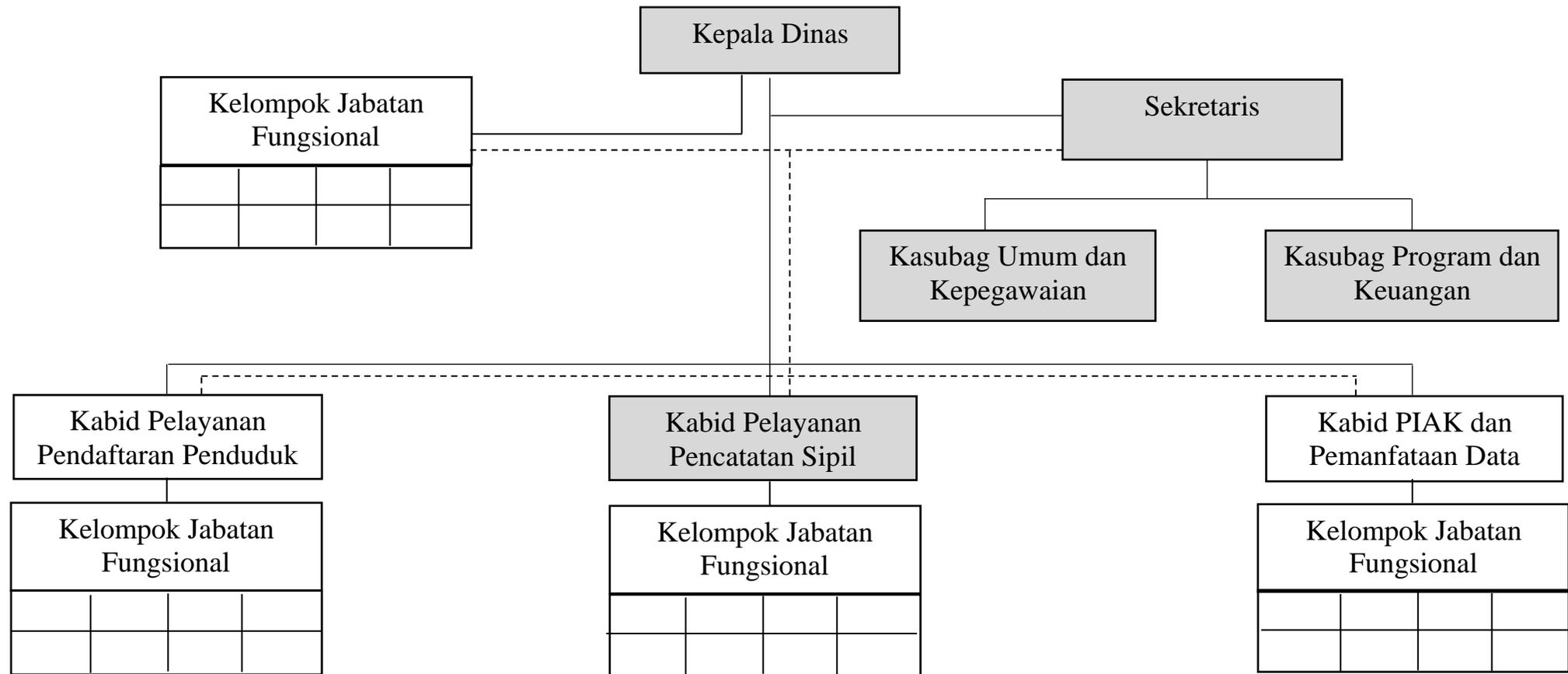
Pemerintah Daerah Kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kewenangan yang meliputi:

- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya dibidang administrasi kependudukan.
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.
- f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota.
- g. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- h. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak/tanpa dipungut biaya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan.

Pembentukan Dinas kependudukan yang organisasinya mandiri dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4750) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 tahun 2011 tentang Dinas Daerah sebagai suatu langkah desain organisasi yang tepat.

**Struktur Organisasi**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi**  
 (Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021)



Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, suatu manifestasi dari rentetan Rencana Strategis Dinas untuk masa Renstra yang diarahkan pada visi dan misi kota, arah dan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD Provinsi Jawa Barat dan tak ketinggalan arah kebijakan Nasional tentang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang makin dinamis.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Kota Cimahi di Tahun 2022 maka berakhir juga periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Berbeda dengan proses pergantian kepala daerah sebelumnya dimana biasanya sebelum masa jabatan suatu kepala daerah berakhir sebelumnya sudah dilaksanakan proses pemilihan umum calon kepala daerah hingga telah terdapat calon terpilih yang akan langsung dilantik saat masa jabatan kepala daerah sebelumnya berakhir, namun untuk kali ini, pelaksanaan pemilukada baru akan dilaksanakan pada kegiatan pilkada serentak tahun 2024 sehingga sejumlah daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan 2023 dimana didalamnya termasuk Kota Cimahi akan mengalami kekosongan jabatan kepala daerah. Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (9) disebutkan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah tersebut, akan diisi dengan penjabat gubernur atau penjabat bupati/walikota sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak tahun 2024.

Kekosongan Kepala Daerah terpilih tersebut juga berimbas kepada ketiadaan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) karena sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 RPJMD adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program seorang kepala daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarlah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dimana disebutkan bahwa Kepala

Daerah yang jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 selain itu Kepala Daerah juga diminta untuk memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. Dengan demikian, RPD sebenarnya mempunyai fungsi yang sama dengan RPJMD yakni sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang membedakan hanya waktu penggunaannya saja yakni hanya selama terjadi masa kekosongan Kepala Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 akan menjadi tahun kedua dalam rangkaian pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026. Karena mengacu pada dokumen rencana kerja jangka menengah yang sama maka pada renja Tahun 2024 ini tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan dengan dokumen renja tahun sebelumnya (2023).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menuangkan rencana program dan kegiatannya ke dalam Renja OPD yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek maka pendekatan yang digunakan yaitu:

- a) Pendekatan Politik; merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan berdasarkan kebijakan Kepala Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD.
- b) Pendekatan Tekhnokratik; yaitu menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor dan lintas pelaku.

- c) Pendekatan Partisipatif; yaitu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.
- d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dengan tersusunnya Renja ini diharapkan dapat meningkatkan peran dinas dalam mewujudkan **Good Governance** dan sekaligus mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi; (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 177);
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Daerah Kota Cimahi;
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024 yaitu mewujudkan

sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan yang berbeda-beda serta mewujudkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai Pedoman rencana organisasi dalam mewujudkan program dan kegiatan pelayanan publik yang lebih baik dan berkesinambungan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut :

##### **Bab 1 Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum sebagai bahan pijakan penyusunan kebijakan, maksud dan tujuan dalam penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

##### **Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Memuat hasil capaian baik segi sasaran maupun Kegiatan oleh OPD Tahun 2023, analisa kinerja pelayanan Disdukcapil yang tertuang dalam hasil pencapaian SPM, isu atau pokok utama yang terkait dengan permasalahan pelaksanaan Tupoksi, Review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

##### **Bab 3 Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan**

Dimulai dengan identifikasi Kebijakan Nasional dengan tetap mengacu pada skala global dielaborasi kedalam RPJMD Provinsi, Kota serta Renja SKPD; tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta rincian program/Kegiatannya.

##### **Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat tentang program dan kegiatan beserta pendanaannya

##### **Bab 5 Penutup**

Memuat kaidah-kaidah sebagai pedoman dan komitmen Kepala Dinas dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yang makin dinamis

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akuntabel yakni kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan termasuk dalam hal pelaporan maka metoda yang dipakai adalah melakukan pengukuran kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja, sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja Kegiatan.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Evaluasi pelaksanaan Renja memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pelaksanaan renstra 2017-2022 dan mulai tahun 2023 sudah menggunakan renstra baru yakni renstra 2023-2026. Dengan adanya pergantian renstra tersebut maka didalamnya terjadi banyak perubahan baik itu perubahan nomenklatur kegiatan/sub kegiatan maupun perubahan indikator kinerjanya.

Untuk susunan dan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan, antara tahun 2022 dan 2023 hanya terdapat sedikit perubahan berupa penambahan beberapa kegiatan dan sub kegiatan baru. Sedangkan untuk indikator kinerjanya, hampir semua indikator

kinerja baik pada program, kegiatan maupun sub kegiatan mengalami perubahan. Mulai tahun 2023 atau mulai rentra 2023-2026, Indikator kinerja untuk sub kegiatan sudah ditentukan dalam Kepmenpan 050-5889 tahun 2021.

Dalam program dan Kegiatan di tahun 2023 terdapat 1 (satu) Urusan Wajib, didukung 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan target dan realisasi seperti pada penjelasan tabel **Tabel 2.1**.

Pada tabel tersebut tidak semua kolom dapat terisi, untuk yang indikator kinerjanya baru ada di tahun 2023 maka realisasi di tahun 2022 tidak dapat dihitung, namun untuk yang indikator kinerjanya tetap sama, maka nilaicapainnya tahun 2022 dapat terisi.

Masih dari tabel 2.1, terlihat bahwa di tahun 2022, realisasi dari semua indikator kinerja sub kegiatan yang terisi tingkat realisasinya sudah mencapai 100%.

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>51,5</b>	-	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>97%</b>
		<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>78,0</b>	BB	BB	BB	100	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>98%</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	<b>94</b>	22	20	20	100	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>26%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	10	10	10	100	10	10	26%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56	19	19	19	100	14	14	25%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu</b>	<b>8</b>	2	2	2	100	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>25%</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	36	42	42	100	45	45	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	1	1	1	100	1	1	25%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4	1	1	1	100	1	1	25%
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkatkan Disiplin dan Kapasitasnya</b>	<b>264</b>	-	-	-	-	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>25%</b>
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	264	-	-	-	-	66	66	25%
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	264	80	60	80	133	66	66	25%
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum</b>	<b>48</b>	12	12	12	100	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>25%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	-	-	-	-	3	3	23%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	-	-	-	-	1	1	25%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	-	-	-	-	2	2	25%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	-	-	-	-	2	2	25%
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16	-	-	-	-	4	4	25%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	-	-	-	-	50	50	25%
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	-	-	-	-	1	1	25%
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	-	-	-	-	1	1	25%
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25%</b>
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	-	-	-	-	12	12	25%
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	-	-	-	-	12	12	25%
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>25%</b>
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16	-	-	-	-	4	4	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	384	-	-	-	-	90	90	23%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>										
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk</b>	<b>99%</b>	-	-	-	-	<b>99%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
		<b>Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak</b>	<b>96%</b>	-	-	-	-	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>94%</b>
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>640000</b>	-	-	-	-	<b>160000</b>	<b>160000</b>	<b>25%</b>
20	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3200	-	-	-	-	800	800	25%
21	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	48	-	-	-	-	12	12	25%
<b>IX</b>	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>53700</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>
22	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk	69000	-	-	-	-	17000	17000	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
	Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia								
<b>X</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>48</b>	-	-	-	-	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>25%</b>
23	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	3900	-	-	-	-	900	900	23%
24	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	21	-	-	-	-	3	3	14%
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun</b>	<b>97,5%</b>	-	-	-	-	<b>96,0%</b>	<b>96,0%</b>	<b>98%</b>
		<b>cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		<b>cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan</b>	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
<b>XI</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>60000</b>	-	-	-	-	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>25%</b>
25	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	80	-	-	-	-	20	20	25%
<b>XII</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>104</b>	-	-	-	-	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>25%</b>
26	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	48	-	-	-	-	12	12	25%
27	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	40	-	-	-	-	10	10	25%
<b>XIII</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
28	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	4	-	-	-	-	1	1	25%
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data</b>	<b>75%</b>	-	-	-	-	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>
		<b>SLA berjalannya SIAK dan KTP-el</b>	<b>95,00%</b>	-	-	-	-	<b>90,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>95%</b>
<b>XIV</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data</b>	<b>23</b>	-	-	-	-	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>43%</b>
29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	8	-	-	-	-	2	2	25%
30	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui hak akses	18	-	-	-	-	5	5	28%
<b>XV</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>96</b>	-	-	-	-	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
31	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	48	-	-	-	-	12	12	25%
32	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	48	-	-	-	-	12	12	25%
<b>XV</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>48</b>	-	-	-	-	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>25%</b>
33	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4	-	-	-	-	1	1	25%
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase OPD yang memanfaatkan profil kependudukan</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2021*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022*)			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022*	Realisasi Renja PD tahun 2022*	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
XVI	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	29	-	-	-	-	29	29	100%
34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	4	-	-	-	-	1	1	25%

Keterangan :

\* Masih masuk ke masa renstra sebelumnya yakni Renstra 2017-2022, dimana mayoritas indikator kinerjanya berbeda dengan Renstra 2023-2026

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Masalah pokok yang dominan dalam penataan administrasi kependudukan yaitu masih terkait dengan relatif rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Selain itu pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang baik dan benar juga masih relatif rendah. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi cukup penting, menambah format sosialisasi kedalam bentuk yang lebih menarik, lebih mengena dan lebih mudah diingat dan dipahami menjadi salah satu tugas penting kedepan. Cara lainnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat diantaranya juga dengan membangun bentuk pelayanan yang lebih memudahkan masyarakat. Sejak tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah mencoba mengembangkan bentuk pelayanan administrasi kependudukan secara daring, diharapkan dengan melalui pelayanan daring masyarakat akan lebih mudah mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, dimana pemohon bisa melakukan pengajuan pelayanan dimanapun dan kapanpun dengan proses yang lebih transparan.

Diawali dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Disdukcapil Kota Cimahi berhasil mengembangkan aplikasi pelayanan daring yang diberi nama SIPADE dan SiBENAR. Akan tetapi waktu itu sangat disayangkan, penggunaan aplikasi tersebut hanya berjalan sebentar karena di awal tahun 2022 terdapat kebijakan SIAK terpusat dari Kementerian Dalam Negeri yang menyebabkan aplikasi pelayanan daring tersebut terpaksa terhenti. Walau aplikasi pelayanannya sudah tidak dapat digunakan, tapi Disdukcapil Kota Cimahi tetap berupaya agar pelayanan secara daring tetap terus dilaksanakan. Untuk sementara itu, pelaksanaan pelayanan daring

menggunakan bantuan aplikasi whatsapp dan google form sambil terus berupaya mengembangkan aplikasi pelayanan daring yang baru yang bisa menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Pada akhir tahun 2022, pengembangan aplikasi pelayanan daring yang baru yang diberi nama “Dilandacita” telah selesai dan mulai diterapkan dalam pelayanan daring administrasi kependudukan di Kota Cimahi.

Secara garis besar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara online menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah di kecamatan;
- b. Telah melaksanakan inovasi pelayanan publik dalam hal pelayanan dokumen kependudukan, yaitu dengan menerapkan sistem paket pelayanan “ *Three in one* ”, Pelayanan untuk penyandang disabilitas dan RW Tuntas yang merupakan pelayanan administrasi kependudukan langsung ke RW yang telah ditentukan;
- c. Selain pelayanan reguler secara offline, telah dilaksanakan juga pelayanan secara online melalui pengembangan aplikasi yang diberi nama DILANDA CITA yang merupakan akronim dari “Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Cimahi Kota”;
- d. Telah melaksanakan stelsel aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan sistem pelayanan keliling baik menggunakan mobil pelayanan keliling maupun ke rumah warga untuk pelayanan yang sakit, jompo dan atau disabilitas;
- e. Telah dilakukannya percepatan pelayanan perekaman KTP Elektronik ke sekolah- sekolah, pelayanan pada hari libur, sabtu dan minggu sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik;
- f. Telah bekerjasama dengan para pemuka agama (non muslim) dalam pelayanan pembuatan akte perkawinan;
- g. Telah dibentuk Wali Gisa untuk membantu percepatan digitalisasi administrasi kependudukan;
- h. Telah bekerjasama dengan pengurus pemakaman dalam penyusunan buku pokok pemakaman;

- i. Telah memfasilitasi instansi dan perangkat daerah dalam memanfaatkan database kependudukan melalui pemberian hak akses baik web portal dan atau web service.

Dengan semua usaha yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut diatas, sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi maupun standarisasi jenis pelayanan melalui suatu indikator yang jelas dan terukur yang akhirnya berdampak pada perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan. Beberapa ukuran atau indikator yang digunakan tersebut yaitu :

- Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
- Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak
- Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun
- Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
- Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
- Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan
- Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data
- SLA berjalannya SIAK dan KTP-el

Terkecuali dua indikator terakhir, indikator yang lainnya merupakan indikator kinerja kunci (IKK) yang ada dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hasil pencapaian berdasarkan indikator-inikator tersebut dapat dilihat pada tabel. 2.2

Dari tabel tersebut terlihat bahwa hanya ada satu indikator kinerja yang digunakan di tahun 2021 dan 2022 (renstra 2017-2022) yang tetap digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun 2023 dan 2024 (renstra 2023-2026 yakni Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan indikator kinerja lainnya merupakan indikator kinerja yang baru digunakan mulai tahun 2023 yakni terdapat dalam renstra 2023-2026. Walaupun indikator tersebut baru digunakan di renstra 2023-2026 akan tetapi sebagian besar data untuk perhitungannya sudah tersedia

sejak tahun 2021 dikarenakan sudah digunakan sebagai indikator kinerja kunci dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD).

Dalam tabel tersebut dapat terlihat juga bahwa realisasi cakupan penerbitan kartu tanda penduduk baik di tahun 2021 maupun tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan kekosongan blanko KTP-el dari pusat sehingga tidak dapat dilakukan proses pencetakan KTP-el.

Untuk realisasi cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada tahun 2021 cukup tinggi yakni mencapai 74,85%, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 73,22% padahal target yang ditetapkan pada tahun 2023 dan 2024 cukup tinggi yakni 90% dan 92%. Oleh karena itu pada tahun 2023 ini dilakukan percepatan penerbitan KIA sehingga realisasi diakhir tahun diperkirakan minimal bisa mencapai 85%.

Pada indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun, realisasi capaian pada tahun 2021 dan 2022 sudah cukup baik dan mengalami peningkatan dengan nilai realisasi tidak jauh dengan nilai target yang ditetapkan untuk tahun 2023 dan 2024.

Realisasi indikator kinerja cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan, indikator kinerja cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan dan indikator kinerja cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan semuanya memiliki capaian yang sangat bagus di tahun 2021 dan 2022 yakni mencapai 100%, sehingga optimis hal tersebut akan terjadi lagi di tahun 2023 dan 2024.

Untuk indikator kinerja Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data dan indikator kinerja SLA (service level agreement) berjalannya SIAK dan KTP-el, keduanya tidak memiliki data capaian untuk tahun 2021 dan 2022 namun optimis melalui berbagai usaha yang dilakukan maka target di tahun 2023 dan 2024 akan tercapai.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan penting
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	—	√	99%	99%	99%	99%	97,49%	92,85%	99%	99%	Sangat tergantung ketersediaan blangko KTP-el dari Pusat
2	cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	—	√	—	—	90%	92%	74,85%	73,22%	85%	92%	
3	cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	—	√	—	—	96%	96,5%	95,58%	95,82%	96,0%	96,5%	
4	cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	—	√	—	—	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	—	√	—	—	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	—	√	—	—	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	—	—	—	—	30%	45%	—	—	30%	45%	
8	SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	—	—	—	—	90%	91%	—	—	90%	91%	

### 2.3 Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diutarakan terdahulu bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan makin seriusnya upaya pemerintah dalam penataan yang berkaitan dengan kependudukan. Paradigma yang bergeser antara lain pelayanan semua dokumen kependudukan gratis; Azas pencatatan administrasi kependudukan berdasarkan peristiwa diubah ditempat domisili; pelaporan kematian menjadi kewajiban RT (Rukun Tetangga) serta stelsel aktif dari aparaturnya sipil.

Dengan diawali oleh Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, berarti sudah dibuatnya satu **Key Word** yang menjadi koridor utama sistem administrasi kependudukan dalam pelayanan kependudukan itu sendiri.

Dengan perkembangan regulasi, pengembangan Informasi Teknologi serta respon atas kebutuhan pelayanan kepada masyarakat maka isu-isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi hambatan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan dan sarana/prasarana yang belum memadai. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit pelayanan lain di Kota Cimahi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.
2. Tidak dimilikinya lagi database kependudukan lokal. Dengan beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat serta dihapusnya database kependudukan lokal di masing masing Disdukcapil daerah menyebabkan berbagai kendala diantaranya dalam hal pengolahan data dan pemanfaatan data untuk berbagai kepentingan di pemerintah daerah.

3. Belum optimalnya pemutakhiran data penduduk terutama masih adanya data warga yang sudah meninggal namun masih tercantum di database;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh instansi atau perangkat daerah. Hal ini terutama akibat adanya ketentuan bahwa pengguna akses data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data;
5. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi pelayanan daring oleh masyarakat. Keberadaan pandemi virus Covid-19 memaksa adanya perubahan dalam mekanisme pelayanan agar bisa menekan kerumunan dan interaksi fisik antar manusia, sehingga dibangun suatu mekanisme pelayanan baru yang minim interaksi tatap muka yakni dengan pelayanan secara daring. Namun ternyata tidak semua masyarakat mampu dan atau mau memanfaatkan jenis pelayanan daring tersebut. Walaupun sebenarnya menggunakan pelayanan daring akan lebih mudah dan efisien, tapi mayoritas masyarakat masih saja lebih memilih pelayanan secara konvensional dengan datang ke tempat pelayanan agar dapat secara langsung berinteraksi dengan petugas.
7. Persiapan pileg, pilpres dan pilkada serentak tahun 2024. Perlu dilakukan percepatan perekaman KTP-el terutama bagi calon pemilih pemula. Perekaman bagi calon pemilih pemula dapat dilakukan terhadap penduduk yang berumur dibawah 17 tahun namun pada hari pencoblosan pemilu nanti usianya sudah mencapai 17 tahun.

Dalam rangka mengantisipasi isu penting terkait Tupoksi di atas maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tupoksi itu sendiri baik dari faktor intern maupun ekstrn oragnaisasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Intern Organisasi

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia baik yang terkait langsung dengan penanganan tekhnis administratif, produk hardcopy/kearsipan maupun yang berbasis Informasi tekhnologi;
- b. Belum mantapnya sinkronisasi koordinasi masing-masing unsur pelaksana di tingkat kelurahan dan kecamatan dan instansi vertikal dalam penanganan pelayanan;
- c. Masih kurangnya peralatan serta jaringan yang mendukung kelancaran tugas di masing-masing tingkatan organisasi;
- d. Budaya kerja yang masih lemah;
- e. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi;

2. Faktor Ektern Organisasi

- a. Kebijakan SIAK terpusat dan penghapusan database kependudukan lokal;
- b. Kebijakan syarat kewajiban melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data bagi pengguna akses data;
- c. Masih kurang kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan;
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan;
- e. Masih lemahnya literasi digital masyarakat terutama dalam menggunakan aplikasi pelayanan adminsitasi kependudukan.

**Tabel.2.3**  
**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Disdukcapil**

Aspek kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan
			Internal	External	
Pra Sarana	Sewa rumah untuk gudang arsip		Gudang Arsip		Arsip aktif rawan rusak dan hilang
Sarana	Jumlah dan atau kondisi dan atau spesifikasi Peralatan pendukung pelayanan belum memadai	Analisa kebutuhan	Pendanaan Kurang		Pelayanan terganggu, kurang maksimal
SDM	Tidak memadai	Analisa Beban kerja	Jumlah SDM Kualifikasi SDM		Pelayanan lama, kurang maksimal
Validitas dan akurasi data	Masih terdapat data ganda, adanya penduduk yang sudah meninggal namun masih terdata di database	Data DKB	Pendanaan kurang, Kesadaran masyarakat kurang		Validitas dan akurasi data kurang memadai
Kesadaran Masyarakat	Akte kelahiran, Akte kematian, perekaman KTP belum optimal	IKK		Kesadaran masyarakat	Capaian kurang
Pemanfaatan data kependudukan	Pengajuan hak akses pemanfaatan data terhambat			Ketentuan pelaksanaan ISO 27001 bagi pengguna hak akses data	

Meskipun banyak hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tupoksi pada prinsipnya secara keseluruhan relative tidak terpengaruh dengan visi dan misi kepala daerah, provinsi, nasional maupun internasional /MDGs mengingat Tupoksi yang dijalankan sebagai lembaga administratif yang diamanatkan dalam Undang-undang.

Mengingat perubahan “*mindset*” Negara dalam penanganan administrasi kependudukan sebagai suatu yang strategis, tantangan yang timbul justru ada pada sikap proaktif aparatur, dukungan pendanaan yang memadai sekaligus sebagai bentuk peluang dari lembaga pelaksana dalam mengembangkan potensi guna di dapat tingkat cakupan pelayanan

Beberapa rekomendasi atau catatan penting yang menjadi fokus antara lain cara penyisiran masyarakat yang belum memiliki dokumen adminduk melalui RW tuntas secara bertahap dan dinamis, pengembangan pelayanan online, pelayanan khusus penyandang disabilitas, pelayanan jemput bola, pelayanan hari libur serta pengembangan model sosialisasi yang lebih baik.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dengan adanya berbagai perubahan baik dari sisi kebijakan serta sistem administrasi kependudukan maupun dari sisi kebutuhan masyarakat maka diperlukan juga adanya berbagai penyesuaian dalam perencanaan.

Beberapa penyesuaian tersebut diantaranya terkait kebutuhan akan ribbon dan film untuk pencetakan KTP-el. Dalam rancangan awal RKPD diperkirakan dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan mengurangi kebutuhan akan pencetakan KTP-el fisik sehingga dalam perencanaan anggaran pembelian ribbon dan film KTP-el dikurangi. Akan tetapi dilihat dari perkembangan kebijakan IKD di pusat, ternyata perkembangan kebijakan IKD tersebut belum sesuai dengan yang diperkirakan yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap KTP-el fisik tidak mengalami perubahan yang signifikan. Akibatnya perencanaan awal dimana kebutuhan ribbon dan film KTP-el dikurangi harus dirubah disesuaikan lagi jumlahnya dengan kebutuhan biasa.

Kebutuhan lainnya terkait kesiapan menghadapi pileg, pilpres dan pilkada serentak tahun 2024, dimana perekaman bagi calon pemilih khususnya pemilih pemula harus digenjot hingga 100% agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya. Caranya dengan melakukan pelayanan-pelayanan perekaman KTP-el non reguler seperti pelayanan jemput bola dan pelayanan di hari libur serta peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan pada **table 2.4**.

Tabel 2.4  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.621.059.000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.997.919.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.621.059.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				11.997.919.000	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Profesionalitas ASN	50,5	9.729.559.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Indeks Profesionalitas ASN	50,5	10.094.419.000	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	23 Dokumen	107.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	23 Dokumen	107.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	51.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	51.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	56.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	56.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2 Laporan	7.711.559.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2 Laporan	7.712.059.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.701.059.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang / bulan	7.701.059.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	6.000.000	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	66 orang	245.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	66 orang	245.500.000	
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	135.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	135.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	110.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	110.500.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 Bulan	1.086.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 Bulan	1.446.860.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	580.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	871.500.000	Kebutuhan pencetakan KTP-el masih tinggi walaupun ada KTP digital
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.000.000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	
12	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	300.000.000	
14	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	31.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	99.360.000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 unit	88.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	1 unit	88.000.000	
15	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	88.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	88.000.000	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	122.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Laporan	125.000.000	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	meminimalisir kemungkinan kekurangan akibat tagihan bertambah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	370.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	370.000.000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	235.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	235.000.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cimahi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	135.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cimahi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	135.000.000	
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99%	531.000.000	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99%	538.000.000	
			Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	92%					Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak		92%
VII I	Pelayanan Pendaftaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	160000	357.000.000	Pelayanan Pendaftaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan	160000	357.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Penduduk		Pendaftaran Penduduk			Penduduk		Pendaftaran Penduduk			
20	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	800 Dokumen	27.000.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	800 Dokumen	27.000.000	
21	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	330.000.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	330.000.000	
IX	Penataan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	102.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	102.000.000	
22	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Cimahi	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	17000 Dokumen	102.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Cimahi	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	17000 Dokumen	102.000.000	
X	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	72.000.000	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	79.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)		
23	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	900 Dokumen	36.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	900 Dokumen	36.000.000		
24	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	36.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	43.000.000	Perlu lebih banyak Sosialisasi adminduk terutama terkait pileg, pilpres pilkada	
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	96,5%	619.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	97%	619.000.000		
			cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%					cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan		100%	
			cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100%					cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan		100%	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%				cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100%		
XI	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	15000 Dokumen	380.000.000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	15000 Dokumen	380.000.000	
25	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20 Layanan	380.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20 Layanan	380.000.000	
XII	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	26 Laporan	152.000.000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	26 Laporan	152.000.000	
26	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	76.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	76.000.000	
27	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10 Laporan	76.000.000	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10 Laporan	76.000.000	
XII I	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	87.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	87.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
28	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	87.000.000	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	87.000.000	
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	45%	709.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	45%	714.500.000	
			SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	91%				SLA berjalannya SIAK dan KTP-el	91%		
XI V	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	15	122.000.000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	15	122.000.000	
29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cimahi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	102.000.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Cimahi	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	102.000.000	
30	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cimahi	Jumlah kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui hak akses	5 Dokumen	20.000.000	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Cimahi	Jumlah kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan melalui hak akses	5 Dokumen	20.000.000	
XV	Penyelenggaraan		Jumlah Laporan	24	475.000.000	Penyelenggaraan		Jumlah Laporan	24	480.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		
31	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	220.000.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	225.000.000	
32	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	255.000.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	255.000.000	
XV	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	112.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	112.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Keluaran Sub Kegiatan	Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
33	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	112.500.000	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	112.500.000	
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	100	32.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Persentase OPD yang memanfaatkan profil kependudukan	100	32.000.000	
XV I	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	29 OPD	32.000.000	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	29 OPD	32.000.000	
34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cimahi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	32.000.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Cimahi	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 Dokumen	32.000.000	
					11.621.059.000					11.997.919.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bentuk kajian perencanaan dengan pertimbangan berbagai aspek maka dalam penelaahan usulan, pendekatan yang digunakan sebagaimana dikemukakan dalam bab pendahuluan, salah satunya Pendekatan *Top-Down* dan *Bottom-Up*, yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.

Dari hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diawali oleh Forum RW dengan *Leading sector* Bappelitbangda Kota Cimahi dan prosesnya dimulai dari Tingkat RT sampai dengan Tingkat Kota Cimahi maka didapat beberapa usulan program dan Kegiatan yang terkait dengan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Disdukcapil Kota Cimahi Tahun 2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Mempermudah Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cimahi Selatan, Cimahi Tengah	Persyaratan lebih jelas, pelayanan lebih cepat, akses lebih mudah	12 Bulan	Diprioritaskan
2	Peningkatan Pelayanan Adnministrasi Publik (Kependudukan)	Cimahi Utara	Pelayanan lebih cepat, akses lebih mudah	12 Bulan	Diprioritaskan
3	Penertiban Administrasi Kependudukan	Cimahi Tengah	Pendaftaran penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1 Kegiatan	Diprioritaskan
4	Sosialisasi Pengurusan Administrasi Disdukcapil	Cimahi Tengah	Sosialisasi via medsos dan tatap muka	1 Kegiatan	Diprioritaskan
5	Pengadaan Buku Induk RT/RW	Cimahi Tengah	Penyediaan buku induk penduduk	1 kegiatan	tidak bisa dilaksanakan karena bertentangan dengan aturan terkait perlindungan data pribadi

Dari usulan-usulan tersebut diatas hampir semuanya merupakan pekerjaan atau kegiatan prioritas dan sudah biasa dilakukan di Disdukcapil Kota Cimahi terkecuali usulan terakhir. Untuk Pengadaan Buku Induk bagi RT/RW tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan aturan terkait perlindungan data pribadi.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sinergitas kebijakan, sinkronisasi program secara vertikal antar tingkatan pemerintahan yang berbeda; antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maka penyusunan RPJMD mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJM Provinsi, Renstra Provinsi harus dibangun.

Salah satu isu strategis yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri Tahun 2019-2024 adalah mengenai Tata kelola pemerintahan daerah dan desa dimana dalamnya diantaranya membahas Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Terkait dengan penerapan SPBE dalam bidang administrasi kependudukan disebutkan mengenai terbangunnya Big Data Kependudukan, Indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan.

Dengan adanya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik tersebut, dilakukan telaahan untuk menserasikan, mensinkronkan dan mensinergikan pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023-2026.

Masih dalam renstra Kemendagri, dalam bahasan Tata kelola pemerintahan daerah dan desa, dalamnya juga terdapat poin mengenai Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari :

- a) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
- b) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
- d) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product*, *out of service*, dan *out of sale*.

Adapun yang menjadi Visi Kementerian Dalam Negeri yang akan dicapai pada Tahun 2019-2024 yakni :

*“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri”*

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Adapun yang terkait dengan Administrasi Kependudukan masuk ke dalam misi ketiga yaitu meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk pendayagunaan administrasi kependudukan.

Sejalan dengan Visi dan Misi , dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, adapun tujuan strategis yang terkait dengan administrasi kependudukan yakni tujuan strategis kedua yakni :

*“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”*

Adapun salah satu Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian tujuan strategis kedua tersebut antara lain yaitu :

Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- a) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan identifikasi masalah, sasaran dan arah kebijakan pemerintah maka tujuan yang ingin dicapai/direncanakan dalam tahun 2023-2026 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan salah satu misi Kota Cimahi seperti yang tercantum dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yakni :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan”

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur dan relevan dan dapat dilaksanakan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yaitu :

“ Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”

Sasaran tersebut diatas memiliki empat buah Indikatornya yaitu :

- Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)
- Prosentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data

### **3.3 Program Dan Kegiatan**

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diperbaiki melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian disempurnakan lagi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka nomenklatur program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hampir keseluruhannya mengalami perubahan.

Adapun rencana pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebanyak 5 program, 17 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yaitu :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar
  - 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
  - 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **B. Program Pendaftaran Penduduk**

- a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar
  - 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan sebesar
  - 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EL, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
  2. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

### **C. Program Pencatatan Sipil**

- a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
  1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
  2. Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  1. Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil

### **D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian database Kependudukan
  1. Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan
  2. Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  1. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan

#### **E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

- a. Penyusunan Profil Kependudukan
  1. Penyusunan Profil data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Eksistensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu menyelenggarakan pelayanan publik pada ruang lingkup pelayanan administratif yaitu yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam undang-undang dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda.

Dalam menuangkan rencana program dan Kegiatannya kedalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi yang berorientasi pada Pelayanan Publik tujuannya diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi, meningkatkan kesadaran penduduk untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, menyediakan database kependudukan yang lengkap dan akurat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal serta untuk penerbitan dokumen kependudukan yang legalitasnya diakui semua pihak.

Guna menjaga kesinambungan dan perubahan kebijakan nasional, Disdukcapil merumuskan program dan kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 5 (lima) Program, 17 (empat belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp. 10.501.960.710,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).**

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan sebagaimana terlampir dalam **Tabel 4.1.**

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023  
dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		10.501.960.710			12.085.925.000		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		10.501.960.710			12.085.925.000		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		10.501.960.710			12.085.925.000		
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	8.819.320.710		-	10.056.925.000	
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	92.000.000		-	112.000.000
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	51.000.000	Kota Cimahi	9 Dokumen	52.000.000
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	41.000.000	Kota Cimahi	14 Laporan	60.000.000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.792.460.710		-	7.866.080.000
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	6.781.960.710	Kota Cimahi	45 Orang/bulan	7.855.080.000
2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000	Kota Cimahi	1 Laporan	5.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2 12 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.000.000	Kota Cimahi	1 Laporan	5.500.000
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	172.000.000		-	250.000.000
2 12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket	61.500.000	Kota Cimahi	66 Paket	135.000.000
2 12 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66 Orang	110.500.000	Kota Cimahi	66 Orang	115.000.000
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	1.196.860.000		-	1.238.845.000
2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	621.500.000	Kota Cimahi	3 Paket	703.845.000
2 12 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14.000.000	Kota Cimahi	1 Paket	14.000.000
2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	62.000.000	Kota Cimahi	2 Paket	67.000.000
2 12 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	90.000.000	Kota Cimahi	2 Paket	100.000.000
2 12 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	10.000.000	Kota Cimahi	4 Laporan	12.000.000
2	12 01 2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	300.000.000	Kota Cimahi	50 Laporan	310.000.000
2	12 01 2.06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	99.360.000	Kota Cimahi	1 Dokumen	32.000.000
2	12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	88.000.000		-	92.000.000
2	12 01 2.07	0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	88.000.000	Kota Cimahi	1 Unit	92.000.000
2	12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	125.000.000		-	123.000.000
2	12 01 2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	Kota Cimahi	12 Laporan	23.000.000
2	12 01 2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Kota Cimahi	12 Laporan	100.000.000
2	12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	353.000.000		-	375.000.000
2	12 01 2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	218.000.000	Kota Cimahi	4 Unit	235.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2 12 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	135.000.000	Kota Cimahi	94 Unit	140.000.000
2 12 02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	513.000.000		-	564.000.000
2 12 02 2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	343.000.000		-	374.000.000
2 12 02 2.01 0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	800 Dokumen	23.000.000	Kota Cimahi	800 Dokumen	32.000.000
2 12 02 2.01 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	320.000.000	Kota Cimahi	12 Laporan	342.000.000
2 12 02 2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	95.000.000		-	115.000.000
2 12 02 2.02 0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	17000 Dokumen	95.000.000	Kota Cimahi	17000 Dokumen	115.000.000
2 12 02 2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	75.000.000		-	75.000.000
2 12 02 2.03 0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	900 Dokumen	32.000.000	Kota Cimahi	900 Dokumen	37.000.000
2 12 02 2.03 0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	6 Laporan	43.000.000	Kota Cimahi	6 Laporan	38.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2 12 03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	578.000.000		-	645.000.000
2 12 03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	375.000.000		-	395.000.000
2 12 03	2.01	0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil					
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	20 Layanan	375.000.000	Kota Cimahi	20 Layanan	395.000.000
2 12 03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	148.000.000		-	160.000.000
2 12 03	2.02	0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil					
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	74.000.000	Kota Cimahi	12 Laporan	78.000.000
2 12 03	2.02	0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10 Laporan	74.000.000	Kota Cimahi	10 Laporan	82.000.000
2 12 03	2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	55.000.000		-	90.000.000
2 12 03	2.03	0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil					
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	55.000.000	Kota Cimahi	1 Laporan	90.000.000
2 12 04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	563.640.000		-	786.000.000
2 12 04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	119.000.000		-	126.000.000
2 12 04	2.01	0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan					
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2 Dokumen	100.000.000	Kota Cimahi	2 Dokumen	105.000.000
2 12 04	2.01	0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	19.000.000	Kota Cimahi	5 Dokumen	21.000.000
2	12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	408.640.000		-	520.000.000
2	12 04 2.03	0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	225.000.000	Kota Cimahi	12 Laporan	255.000.000
2	12 04 2.03	0007 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat					
		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12 Laporan	183.640.000	Kota Cimahi	12 Laporan	265.000.000
2	12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	36.000.000		-	140.000.000
2	12 04 2.04	0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan					
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	36.000.000	Kota Cimahi	1 Laporan	140.000.000
2	12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	28.000.000		-	34.000.000
2	12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	28.000.000		-	34.000.000
2	12 05 2.01	0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain					
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	28.000.000	Kota Cimahi	1 Dokumen	34.000.000
<b>J U M L A H</b>				<b>10.501.960.710</b>			<b>12.085.925.000</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahun kedua yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Rencana Kerja pada dasarnya memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024 ini menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tahun 2024 dan menjadi acuan bagi kepala Perangkat Daerah agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan, oleh karena itu perlu dipedomani kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum OPD serta forum penyelenggaraan Musrenbang ditujukan untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD dan Renja OPD.
2. Peran Masyarakat diletakkan sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/Kegiatan.
3. OPD dan Unit-unit kerja serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD dan OPD dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024, Renja OPD Tahun 2024 akan menjadi bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran.
5. Dalam rangka sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan Kegiatan dengan sumber pendanaan yang berbeda (APBD, APBN) maka OPD dalam membuat Renja sesuai dengan sumber anggaran.
6. Setiap Kepala OPD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dalam mencapai efektifitas dan

effisiensi dan menyampaikan hasil evaluasi triwulanan maupun Tahunan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda.

7. RKPD dan Renja OPD Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tahun 2024 diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi.